

# BAB I

## PENDAHULUAN

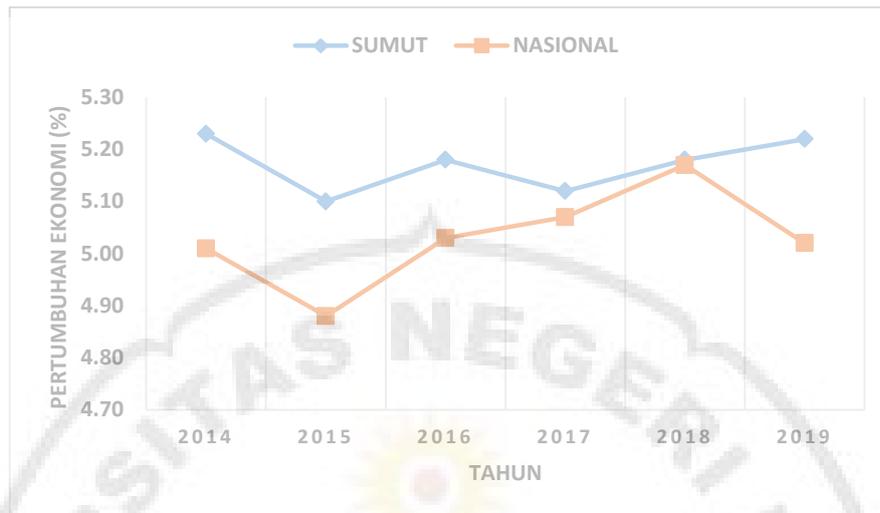
### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan tidak hanya mengenai mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, tetapi juga merupakan suatu proses multidimensional dengan cakupan berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan utama antara lain: Pertama, peningkatan atas ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup. Kedua, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan). Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2006).

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi dari pertanian menuju industri atau jasa dan perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dilihat dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan jumlah lapangan kerja dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah (Panjawa, 2014). Suatu perekonomian yang berkembang dengan pesat tidak menjadi jaminan bagi suatu wilayah dapat dikatakan makmur jika tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja guna menampung tenaga kerja baru yang setiap tahunnya memasuki dunia kerja (Sandika, 2014).

Potensi ekonomi suatu daerah menggambarkan sejauh mana berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya mempunyai kekuatan dalam memberikan kontribusi produktif terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam (SDA) meliputi pertanian, perikanan/kelautan, dan pertambangan. Sedangkan potensi sumber daya manusia (SDM), selain dalam jumlah penduduk juga jumlah pekerja. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisiensi. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan.

Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu propinsi dengan letak yang cukup strategis dan memiliki pengaruh kuat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah PDRB yang cukup besar. Selama periode 2014-2019 pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara nilainya selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan gambar 1.1 di bawah, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara selama periode 2014-2019 sebesar 5.17 persen, nilainya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5.03 persen dalam periode yang sama. Ekonomi Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2017-2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan pada tahun 2019.



Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2019

Sumatera Utara dengan segala potensi sumberdaya yang dimilikinya termasuk di dalamnya sumberdaya manusia seharusnya dapat menjadi faktor pendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk sekitar 14,56 juta jiwa atau 5.43 persen dari distribusi penduduk nasional pada 2019 dapat menjamin ketersediaan tenaga kerja sebagai faktor pendorong pembangunan di Sumatera Utara.

Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya penting dalam proses pembangunan, dengan faktor produksi tenaga kerja yang melimpah maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menurut Gray (1992), tujuan menciptakan kesempatan kerja berkaitan erat dengan pertimbangan pemerataan pendapatan, mengingat bagian terbesar kelompok penduduk yang tergolong penganggur sekaligus merupakan golongan yang berpenghasilan

rendah. Ketersediaan jumlah tenaga kerja yang cukup besar di Sumatera Utara dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya yang terus meningkat dari tahun ketahun. Namun, peningkatan ketersediaan jumlah tenaga kerja harus diikuti juga dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Pada umumnya baik di negara berkembang maupun negara maju, laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibandingkan laju penyediaan lapangan kerja yang dapat berdampak pada tingkat pengangguran.

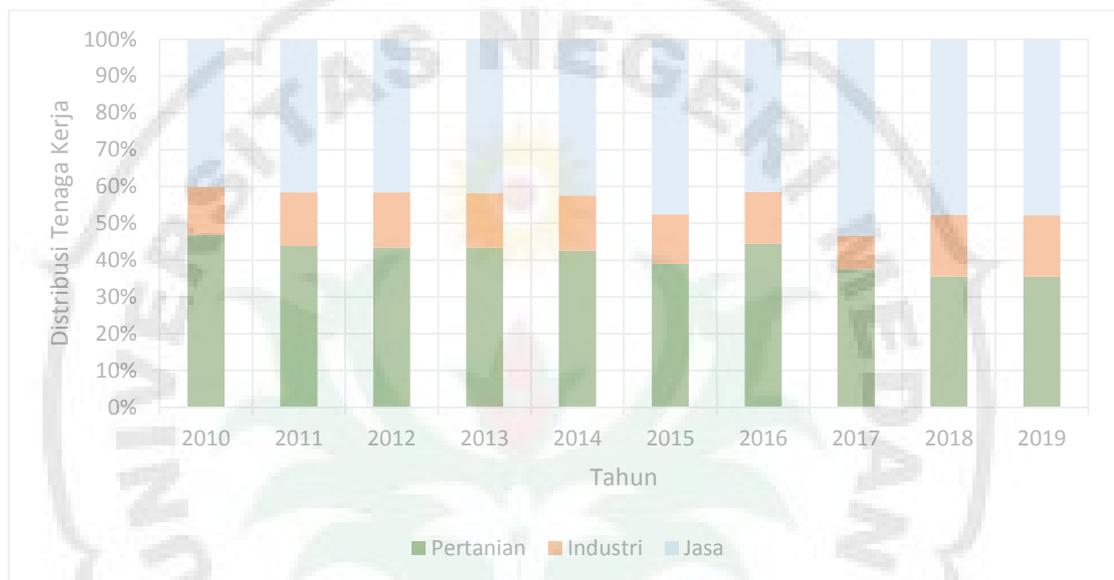
**Tabel 1.1.** Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara

Tahun	Angkatan Kerja (ribu jiwa)	Bekerja (ribu jiwa)	TPAK (%)	TPT (%)
2010	6,617	6,126	69.51	7.43
2011	6,314	5,912	67.62	7.18
2012	6,132	5,752	69.41	6.31
2013	6,312	5,899	70.57	6.04
2014	6,272	5,881	67.07	5.95
2015	6,391	5,962	67.28	6.39
2016	6,363	5,991	65.99	6.49
2017	6,743	6,366	68.80	5.60
2018	7,124	6,728	71.82	5.56
2019	7,451	7.036	70.19	5.41

Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id)

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara mengalami pertumbuhan. Dilihat dari tingkat partisipasinya juga mengalami peningkatan bahkan mencapai hampir 72 persen pada 2018. Dilain sisi justru tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan dan masih dikisaran angka 5 persen setiap tahunnya. diharapkan ketersediaan lapangan kerja di pasar tenaga kerja dapat memberikan kesempatan yang baik terhadap penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara.

Jika dilihat dari distribusi tenaga kerjanya, sektor pertanian dan jasa adalah sektor penyumbang tenaga kerja terbesar di Sumatera Utara yang nilai distribusinya di atas 35 persen, sedangkan distribusi tenaga kerja pada sektor industri nilainya hanya di bawah 20 persen.



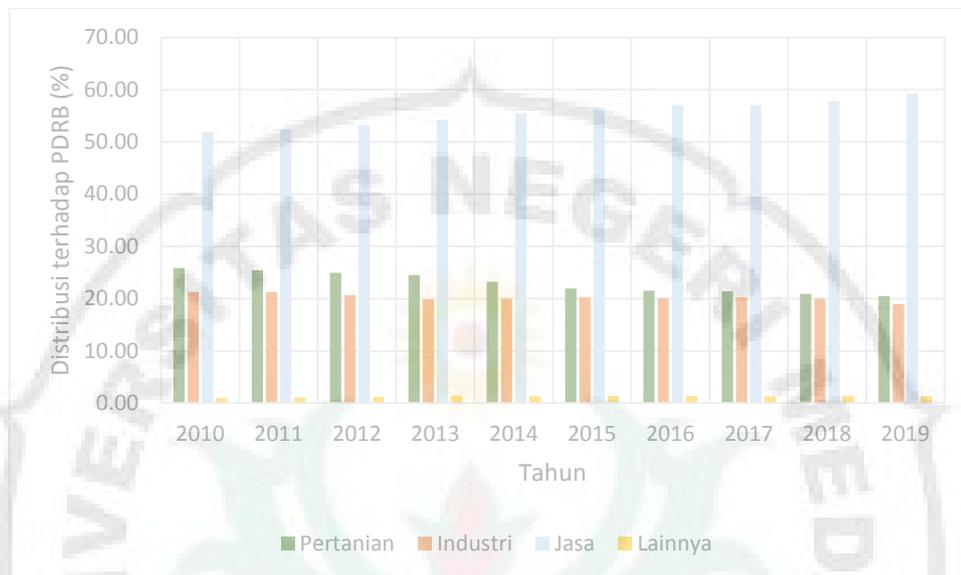
Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.2.** Distribusi Persentase Tenaga Kerja Menurut Sektor di Sumatera Utara Tahun 2010-2019

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pada periode 2010-2014 penyerapan kerja pada sektor pertanian lebih besar dibandingkan penyerapan kerja pada sektor jasa dan industri, namun dalam lima tahun terakhir yaitu pada periode 2015-2019, penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa menjadi yang tertinggi. Distribusi tenaga kerja pada sektor pertanian cenderung mengalami penurunan, sedangkan pada sektor industri dan jasa distribusi penyerapannya cenderung mengalami peningkatan.

Untuk distribusinya terhadap PDRB, sektor jasa yang terdiri dari beberapa lapangan usaha menjadi menjadi sektor penyumbang terbesar PDRB yang nilai

distribusinya di atas 50 persen. Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor industri, distribusinya terhadap PDRB Sumatera Utara hanya sekitar 20-25 persen.



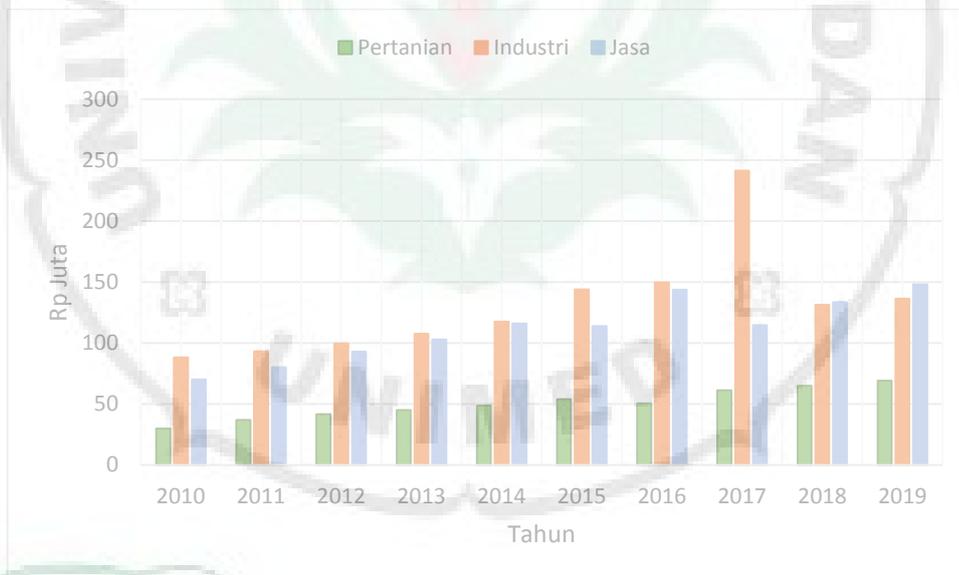
Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.3.** Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor di Sumatera Utara Tahun 2010-2019

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, terlihat bahwa sektor jasa merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Sumatera Utara, nilai kontribusinya di atas 50 persen dan kontribusinya terus tumbuh setiap tahunnya selama periode 2010-2019. Hal ini sejalan dengan distribusi tenaga kerja pada sektor jasa yang juga paling tinggi, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski distribusi tenaga kerja pada sektor industri merupakan yang terkecil bahkan hampir 50 persen lebih sedikit dari kontribusi tenaga kerja pada sektor pertanian, di mana tercatat pada 2009 distribusi tenaga kerja pada sektor industri hanya sebesar 16.7 persen dan sektor pertanian sebesar 35.5 persen. Sektor industri dengan distribusi tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding sektor pertanian justru menunjukkan kontribusi terhadap nilai PDRB yang lebih baik dengan nilai kontribusi yang tidak berbeda jauh. Hal ini menandakan bahwa dengan jumlah

tenaga kerja yang sama, output yang dihasilkan oleh sektor industri jauh lebih besar dari sektor pertanian. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan, sedangkan pada sektor industri cenderung stagnan.

Jika dilihat dari produktifitas tenaga kerja masing-masing sektor menunjukkan bahwa sektor industri memiliki tingkat produktifitas yang lebih tinggi jika dibanding sektor lainnya. Nilai produktifitas rata-rata tenaga kerja diperoleh dari rasio antara jumlah PDRB setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada masing-masing sektor setiap tahunnya.



Sumber: [sumut.bps.go.id](http://sumut.bps.go.id) (data diolah)

**Gambar 1.4.** Produktifitas Rata-Rata Tenaga Kerja per Tahun di Sumatera Utara Tahun 2010-2019

Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa produktifitas rata-rata tenaga kerja pada sektor industri lebih baik dibanding sektor pertanian dan jasa. Dalam sepuluh tahun terakhir (2010-2019), rata-rata produktifitas tenaga kerja sektor industri sebesar 130,94 juta per tenaga kerja, lebih tinggi jika dibandingkan sektor jasa dengan produktifitas sebesar 111,63 juta per tenaga kerja dan sektor pertanian

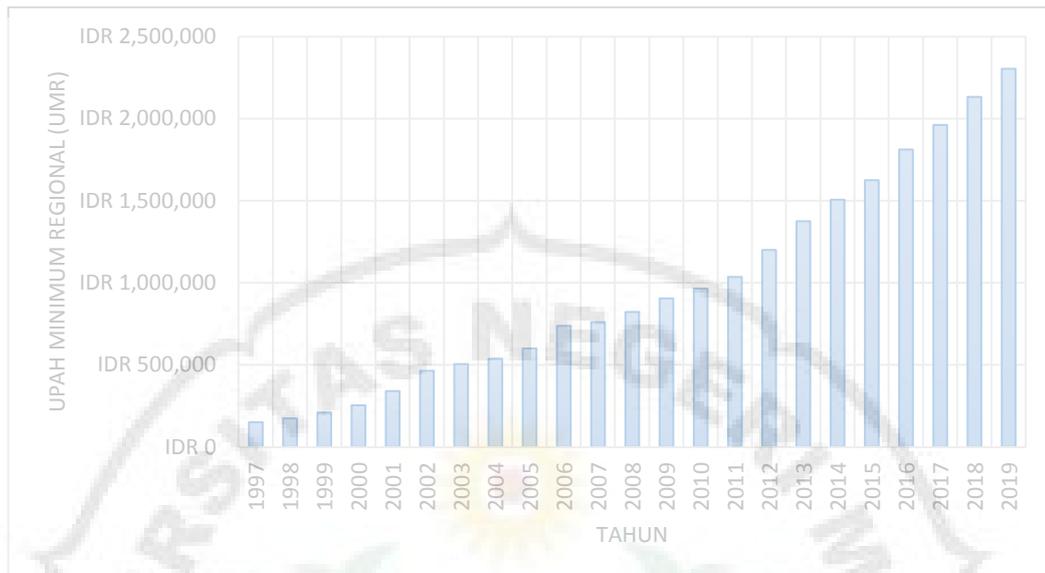
dengan produktifitas yang hanya sebesar 50,17 juta per tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri masih menjadi sektor unggulan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Sektor industri merupakan sektor pemimpin (*leading sector*). Dengan adanya pembangunan sektor industri maka akan memacu dan mendorong pembangunan sektor lainnya, seperti pada sektor pertanian dan sektor jasa, sehingga nantinya akan menyebabkan meluasnya peluang kerja yang akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Proses Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti pula bahwa industrialisasi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia dengan disertai upaya untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian proses industrialisasi dapat diupayakan dengan dua jalan sekaligus, yaitu secara vertikal yang diindikasikan dengan semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara horizontal yang diindikasikan dengan semakin luasnya lapangan kerja produktif yang tersedia bagi penduduk (Arsyad, 2010).

Jika berbicara mengenai pasar tenaga kerja maka harus dilihat dari dua sisi, yaitu, permintaan dan penawaran. Dalam hal ketenagakerjaan, permintaan tenaga kerja menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu. Sedangkan penawaran tenaga kerja merupakan suatu hubungan antara

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang para penyedia tenaga kerja siap untuk menyediakannya. Permintaan dan penawaran tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Bagi perusahaan upah merupakan biaya yang dikeluarkan sedangkan bagi masyarakat upah merupakan pendapatan yang diterima. Perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan upah akan mengurangi penyerapan tenaga kerja dari sisi permintaan dan menambah penawaran terhadap tenaga kerja. (Sholeh, 2007)

Suatu perusahaan dalam menetapkan upah secara proporsional bagi karyawannya ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah berdasarkan standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah di masing-masing daerah. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan layak masyarakat di suatu wilayah. Dari sisi penawaran upah yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Di lain sisi penetapan upah minimum sering tidak memperhatikan mekanisme dalam pasar tenaga kerja dari sisi permintaan sehingga berdampak turunnya penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran. (Izzaty & Sari, 2013)



Sumber: *bps.go.id* (data diolah)

**Gambar 1.5.** Upah Minimum Regional (UMR) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1997-2019

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa penetapan upah minimum oleh pemerintah setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tingkat upah minimum terjadi pasca krisis tahun 1998 dengan pertumbuhan Upah Minimum Regional (UMR) rata-rata di atas 20 persen dari tahun sebelumnya, dan tahun 2002 dengan catatan pertumbuhan UMR di Sumatera Utara hingga sebesar 36.27 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 yang hanya mencatat pertumbuhan tingkat UMR di Sumatera Utara sebesar 3.15 persen dari tahun sebelumnya. Dan dalam tiga tahun terakhir 2017-2019, pertumbuhan rata-rata UMR di Sumatera Utara berkisar 8 persen disetiap tahun.

Selain tingkat upah, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Menurut Rizqal (2010), selain upah, faktor seperti PDRB, investasi langsung dan kenaikan harga barang konsumsi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Secara spesifik Chikwanha (2013) menyatakan bahwa pada sektor industri, permintaan tenaga

kerja dipengaruhi oleh upah, output produksi, tingkat suku bunga, dan investasi langsung. Indarti (2016) dan Pramusinto (2020) mengatakan bahwa jumlah unit industri juga dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Sedangkan dari sisi penawaran, Silva (2000) menjelaskan bahwa pola konsumsi dan tabungan rumah tangga dapat mempengaruhi pasokan atau penawaran tenaga kerja. Seseorang melakukan penawaran kerja atas dasar keinginan individu untuk memperoleh barang dan jasa (tingkat konsumsi individu), sehingga mereka harus mengorbankan beberapa jam waktu luang yang dimiliki. Penawaran tenaga kerja merupakan hasil dari keputusan untuk bekerja tiap individu (Borjas, 2016). Peningkatan pendapatan non-kerja (*non labor income*) akan mengurangi jam kerja pekerja. Peningkatan dalam pendapatan non-kerja (*non labor income*) mengurangi kemungkinan seseorang memasuki dunia kerja (Oguz, 2018). Borjas (2016), mengatakan bahwa tabungan masyarakat merupakan bagian dari pendapatan non-kerja (*non labor income*).

Oleh karena itu, kondisi pasar tenaga kerja di Sumatera Utara baik dari sisi permintaan maupun penawaran perlu diidentifikasi lebih baik agar keadaannya bisa diketahui. Bila kita mengetahui kondisi pasar tenaga kerja di Sumatera Utara, jumlah pengangguran dapat dikurangi dan ditekan sampai ke tingkat paling rendah dan seideal mungkin. Berdasarkan berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja di Sumatera Utara**”.

## 1.2 Batasan Masalah

Penyerapan pasar tenaga kerja di Sumatera Utara dalam penelitian ini dilihat berdasarkan fungsi permintaan dan penawarannya. Dimana penyerapan tenaga kerja lebih difokuskan pada sektor industri khususnya industri besar dan menengah yang memiliki nilai tambah yang cukup besar serta merupakan *leading sector* yang diperkirakan dapat mendorong pembangunan sektor lainnya.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh upah, investasi, output, tingkat suku bunga dan jumlah unit industri terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara ?
2. Bagaimana pengaruh upah, konsumsi, dan tabungan masyarakat terhadap penawaran tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh upah, investasi, output, tingkat suku bunga dan jumlah unit industri terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah, konsumsi, dan tabungan masyarakat terhadap penawaran tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis bagi mahasiswa atau peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan kajian lebih lengkap mengenai keadaan pasar tenaga kerja di Sumatera Utara khususnya pada sektor industri dilihat dari sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Bagaimana upah serta variabel lainnya dapat mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja di Sumatera Utara.

Dan secara praktis bagi pemerintah dan *stakeholder* lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara dengan tujuan mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

